

PUSKESMAS KRATON DAN PAKUALAMAN TERAKREDITASI

Tempati Gedung Baru, Kualitas Layanan Terjamin

YOGYA (KR) - Puskesmas Pakualaman dan Kraton mampu mempertahankan akreditasi setelah menempati gedung baru. Kualitas layanan dan mutu juga dipastikan terjamin bahkan bisa semakin optimal.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogya Emma Rahmi Aryani, menjelaskan Puskesmas Pakualaman menjalani akreditasi pada 13 Februari 2025 lalu, dan dilanjutkan Puskesmas Kraton pada 20 Februari 2025. "Ketika puskesmas sudah terakreditasi harapannya mutu layanan ini menjadi syarat untuk kelanjutan bantuan dari dana alokasi khusus (DAK) fisik untuk relokasi puskesmas," jelasnya, Jumat (21/2).

Pelaksanaan akreditasi menjadi syarat bagi Puskesmas Pakualaman dan Puskesmas Kraton untuk melaksanakan atau memulai operasional pelayanan kesehatan di gedung yang baru. "Semoga dengan fasilitas baru dan gedung yang lebih nyaman, masyarakat baik di Kemantren Kraton maupun Kemantren Pakualaman bisa menikmati layanan yang lebih baik dan berkualitas, sesuai dengan yang telah disediakan oleh pemerintah,"

tambahnya.

Sementara itu, Kepala Puskesmas Kraton Deo Hadi Nanda, mengungkapkan Puskesmas Kraton yang sebelumnya terletak di Jalan Musikanan, kini telah pindah ke gedung baru di Jalan Langenastran Kidul Nomor 3 Kelurahan Panembahan. Gedung baru tersebut memiliki luas lahan 1.300 meter persegi serta dilengkapi ruang dan fasilitas yang lebih memadai jika dibanding lokasi lama.

Dirinya pun menyampaikan terima kasih atas dukungan dari pemerintah serta Lembaga Akreditasi Puskesmas Klinik dan Laboratorium Indonesia (LAPKLIN) yang telah memfasilitasi proses akreditasi.

"Dengan adanya akreditasi ini kami berharap dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal bagi masyarakat Kota Yogya, serta menjadi contoh bagi fasilitas kesehatan lainnya untuk terus meningkatkan kualitas layanan," urainya.

Salah satu Surveyor Akreditasi dari LAPKLIN Dr Arlina Dewi, juga memberikan apresiasi terhadap kolaborasi yang terjalin antara Puskesmas Kraton dengan berbagai sektor terkait. "Saya sangat mengapresiasi sinergitas yang terjalin antara Puskesmas Kraton bersama lintas sektor, termasuk Forum Komunikasi Pimpinan Kemantren (Forkopimtren), yang sangat mendukung proses akreditasi

ini," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kerja sama ini menjadi bukti komitmen bersama dalam meningkatkan layanan kesehatan di wilayah tersebut. Dengan terakreditasi ini, ia berharap sinergi ini dapat semakin mempererat hubungan antara puskesmas, pemerintah serta masyarakat, dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga Kota Yogya.

"Akreditasi ini bukan hanya sekadar pencapaian administratif, tetapi juga menjadi momen penting dalam memperkuat kerja sama untuk terus memberikan layanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat," katanya. **(Dhi)-f**

JAGA STABILITAS HARGA DI TENGAH KENAIKAN PERMINTAAN

Pasar Murah Kemantren Jadi Upaya Pengendali Inflasi

YOGYA (KR) - Pasar murah kemantren yang digulirkan Pemkot Yogya jelang Ramadan mendapat sambutan antusias masyarakat. Upaya tersebut bahkan turut menjadi pengendali inflasi guna menjaga stabilitas harga pokok di tengah kenaikan permintaan.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Yogya Kadri Renggono, mengatakan pasar murah kemantren sudah digulirkan sejak 17 Februari 2025 dan akan berakhir pada 6 Maret 2025.

"Ini bagian dari upaya Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga ketersediaan pasokan dan mendekatkan pasokan bahan pokok kepada masyarakat. Saat ini sudah menjelang Ramadan, biasanya kebutuhan masyarakat akan bahan pokok juga relatif meningkat," katanya, Jumat (21/2).

Selain memantau keberlangsungan pasar murah di masing-masing kemantren pihaknya juga akan melakukan pemantauan di beberapa pasar rakyat dan ritel. Tujuannya untuk memastikan harga terkendali dan daya beli masyarakat tetap terjaga dalam memenuhi kebutuhannya. Sejauh ini inflasi di Kota Yogya masih terjaga di angka 2,5 plus minus 1 persen.

Sejalan dengan itu Kepala Bidang Ketersediaan Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan Dinas

Perdagangan Kota Yogya Sri Riswanti, menjelaskan dari 14 kemantren yang disasar ada tiga wilayah yang mendapat kuota lebih yaitu enam ton pasokan bahan pokok.

"Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) warga kurang mampu tertinggi di Kota ada di Umbulharjo, Mergangsan, dan Gondokusuman, sehingga pasokannya ditambah dua ton. Kalau kami hitung dari kupon empat ton bisa diakses sekitar 300 warga, kalau enam ton lebih dari 500 warga," jelasnya.

Pihaknya menerangkan bahan pokok di pasar murah kemantren mendapat subsidi biaya distribusi dari APBD sebesar Rp 2.000 untuk per satu kilogram komoditas. Sehingga manfaat yang diterima masyarakat sekitar mencapai Rp 1.700 setelah dipotong pajak.

"Kami menggandeng PT Bulog dan PT Pangan Surya Makmur sebagai distributor utama dalam penyediaan bahan pokok. Harga yang ditawarkan di bawah pasaran ataupun Harga Eceran Tertinggi (HET) karena ada subsidi biaya pengiriman. Untuk pembelian bahan pokok seperti beras tidak ada batasan per orang atau per KTP, tapi minyak goreng dibatasi maksimal tiga liter per orang karena stok yang terbatas," tandasnya.

(Dhi)-f

KIRAB BUDAYA DI LINGKUNGAN SEKOLAH

Lestarikan Budaya, Wujud Cinta DIY

YOGYA (KR) - Menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-270 DIY, seluruh siswa sekolah menengah dan SLB se DIY melakukan kirab budaya pawai berkeliling di seputaran sekolah. Hal itu sebagai bentuk penghormatan dan ikut merayakan Hari Ulang Tahun ke-270 DIY, pada 13 Maret 2025 yang akan datang.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Suhirman M Pd saat melepas kirab di SMA Negeri 8 Yogyakarta menyampaikan, acara itu dilakukan sebagai wujud kecintaan seluruh warga DIY atas kondisi aman, nyaman dan tentram di DIY. Disamping itu juga menjadi cara mencintai dan nguri-nguri budaya Yogyakarta yang adiluhung.

"Kemajuan teknologi digital sekarang ini, para siswa tidak boleh tercerabut dari budaya adiluhung Yogyakarta. Tetap menjadi generasi yang memiliki perilaku *andhapasor, tepa selira* dan sopan serta santun dengan siapapun. Itulah perwujudan *jalma kang utama*," kata Kepala Disdikpora DIY Suhirman di Yogyakarta, Jumat (21/2)

Disampaikan pula, seluruh siswa se-DIY dengan penuh semangat dan kebanggaan melaksanakan kirab budaya di lingkungan sekolah masing-masing. Dan kirab budaya berjalan lancar dan sukses dilaksanakan. Dalam memeriahkan peringatan HUT ke-270 DIY ini Disdikpora DIY bukan hanya mengadakan kirab budaya, akan tetapi

juga ada beraneka kegiatan lainnya. Diantaranya diadakan lomba pembuatan konten pendidikan khas kejogjaan, geguritan, tembang jawa, mendongeng bahasa Jawa, menulis surat ke orangtua dengan bahasa dan aksara Jawa, peragaan busana gagrak Ngayogyakarta, dan menyanyi tembang anak-anak.

"Lomba-lomba itu diperuntukan untuk seluruh siswa dan juga guru se DIY.

HUT ke-270 DIY ini diharapkan menjadi momentum untuk terus memupuk rasa kebanggaan dan kesadaran akan pentingnya melestarikan budaya adiluhung DIY. Karena dengan melestarikan budaya, kita juga melestarikan identitas dan jati diri kita sebagai warga Daerah Istimewa Yogyakarta," terangnya. **(Ria)-f**

SLEMAN (KR) - Universitas

Negeri Yogyakarta (UNY) resmi mewisuda 1.972 mahasiswanya yang berasal dari empat jenjang studi dalam upacara wisuda Periode III Tahun Akademik 2024/2025 pada Sabtu (22/2) di GOR UNY. Seluruh wisudawan diharapkan bisa menjadi bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.

Rektor UNY, Prof Dr Sumaryanto MKes AIFO dalam sambutannya mengatakan, wisudawan yang secara resmi telah menyandang gelar dinilai telah menjadi bagian penting dalam usaha pembangunan SDM di Indonesia. "Para wisudawan/wisudawati hari ini telah menjadi bagian penting dalam usaha pembangunan SDM yang unggul dalam bidang kompetensi masing-masing," terang Rektor.

Rektor berharap kepada semua wisudawan untuk turut berperan aktif dalam seluruh kebijakan yang telah direncanakan dalam pembangunan nasional. "Semua wisudawan kami harap turut mendukung berbagai kebijakan dan program pemerintah dari berbagai aspek kehidupan. Semoga seluruh wisuda/wisudawati semangat dan berkomitmen membangun negeri tercinta Indonesia ini sesuai dengan potensi dan profesi masing-masing," tandasnya.

Dalam upacara wisuda kali ini, 1.972 lulusan yang diwisuda terbagi dalam, 63 orang dari Program Doktor, 615 orang Program Magister, 1.132



KR-Adhitya Asros

Prosesi wisuda mahasiswa UNY di GOR UNY.

orang Program Sarjana, dan 162 orang Program Sarjana Terapan. "Kami welcome apabila yang diwisuda pada hari ini akan ada yang studi lanjut di UNY, baik ke jenjang S2 atau S3,"ucap Rektor.

Dalam wisuda kali ini, wisudawan lulus tercepat untuk Program Doktor diraih Saudara Dr Agustina Mei dengan masa studi 2,33 tahun dengan IPK 3,9 dengan predikat cumlaude dari Program Studi Pendidikan Dasar S3 FIPP. Program Magister diraih Saudara Kunto Aji Utomo, M.Pd. dengan masa studi 1,01 tahun, IPK 3,94 dengan predikat cumlaude dari Program Studi Manajemen Pendidikan S2 FIPP.

Untuk Program Sarjana diraih Saudari Aisyah Salma Isnaini SPD

dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar S1 FIPP dengan masa studi 3,24 tahun, IPK 3,86 dengan predikat cumlaude, sedangkan Program Sarjana Terapan dengan masa studi 3,42 tahun diraih Saudara Zahir Al Fayyedi STrT dengan IPK 3,89 dengan predikat cumlaude dari Program Studi Teknik Sipil D-IV FV.

Predikat Lulusan Termuda untuk Program Doktor diraih Saudara Dr Kurniawan Sigit Wahyudi dengan predikat cumlaude dari Program Studi Pendidikan Teknologi Kejuruan S3 dengan usia 27,19 tahun. Program Magister pada usia 22,64 tahun atas nama Saudari Nadia Ramona MPd dengan IPK 3,97, dari Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini S2 FIPP dengan predikat cumlaude. **(Hit)-f**

Musyawarah Wilayah HIMPSI DIY 2025

YOGYA (KR) - Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Wilayah DIY menyelenggarakan Musyawarah Wilayah (Musywil) 2025 di kampus Fakultas Psikologi UGM, Sabtu (22/2). Adi Heryadi, selaku Ketua Panitia mengatakan, Musywil sebuah forum penting bagi para psikolog dan akademisi dalam memperkuat peran profesi psikologi di tengah dinamika sosial dan teknologi yang terus berkembang. Kegiatan bertema 'Guyub Rukun Sambung Rasa Majukan Psikologi Bersama'.

Menurut Adi Heryadi, Musywil menjadi ajang strategis bagi anggota HIMPSI untuk melakukan evaluasi program kerja, membahas tantangan dan peluang dalam dunia psikologi, serta memilih kepemimpinan baru untuk periode mendatang. Berbagai sesi diskusi dan seminar akan menghadirkan narasumber dari akademisi, praktisi, serta pemangku kebijakan guna membahas peran psikologi dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital, termasuk kese-

hatan mental, pendidikan, serta transformasi layanan psikologi berbasis teknologi. "Kami berharap acara ini dapat menjadi wadah bagi para psikolog untuk berkolaborasi, bertukar gagasan, serta memperkuat jaringan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ilmu psikologi," ujarnya.

Muh Hidayat, Humas Musywil menginformasikan, Musyawarah Wilayah HIMPSI DIY 2025 menghasilkan pengurus baru, Ketua baru periode 2025-2029 yakni Miftahun Ni'mah Suseno SPsi MA serta 5 orang anggota Majelis Psikologi Wilayah DIY yakni Prof Dr Tina Afiatin MSi, Dr Sus Budiharto MSi, Dr Pihasinwati MA, Dr Sumedi P Nugraha MEd MSc PhD dan Dra Sri Kusrohmaniah MSi, PhD. Sebelum pemilihan pengurus baru, ketua periode Cornelius Siswa Widyatmoko MPsi menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan diterima. **(Jay)-f**



Raden Arditya Mutwara L, M.Kom
Dosen Ilmu Komunikasi
Universitas Amikom Yogyakarta

JAGAT media sosial kembali dihebohkan dengan seruan tarik uang dari bank BUMN. Seruan tarik uang ini muncul bersamaan dengan momen pemerintah mengumumkan tentang pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Agananta Nusantara (BPI Danantara). Danantara

sedianya akan mengelola investasi dari dana dividen 65 BUMN. Tiga BUMN diantaranya adalah bank pelat merah, yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Mandiri.

Cuitan awal muncul dari media sosial X (dulunya twitter), satu dari sekian banyak cuitan menyerukan untuk menarik seluruh saldo tabungan dari bank pelat merah dan dipindah ke bank swasta. Banyak pro dan kontra yang muncul setelah cuitan ini ramai dibicarakan. Salah satu pihak yang pro (setuju) dengan cuitan ini menyebutkan kekhawatirannya karena isu bahwa Danantara tidak bisa diaudit oleh Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK). Isu ini segera ditepis oleh pihak istana (pemerintah) bahwa Danantara hanya akan mengelola dividen BUMN dan bisa diaudit oleh BPK.

Pemerintah sampai saat ini memang belum secara gamblang menjelaskan bagaimana tata kelola investasi yang akan dilakukan Danantara. Sejak disahkannya revisi UU BUMN dalam rapat paripurna DPR Selasa (4/2) yang lalu, UU yang menjadi payung hukum Danantara tersebut belum dapat diakses. Sehingga sampai saat ini kepastian tentang apa saja yang diatur di dalamnya masih samar. Kesimpang-siuran ini menjadi salah satu faktor

"trust issue" yang muncul di kalangan warganet.

Faktor lain yang menyebabkan masifnya seruan tarik uang dari bank BUMN adalah wacana Jokowi dan ormas keagamaan sebagai pengawas Danantara. Beberapa saat yang lalu sempat muncul wacana tersebut. Kemudian, ketika teman-teman media mencoba mengonfirmasi hal itu kepada Jokowi, beliau tidak serta merta membantah isu tersebut. "Masih digodok dan dimatangkan (pemerintah)," katanya seperti dikutip dari CNN Indonesia.

Di lain sisi, warganet yang kontra terhadap seruan tarik uang massal

dari bank-bank BUMN berpendapat bahwa tarik uang secara besar-besaran dan bersama-sama akan menimbulkan efek jangka pendek yang buruk, seperti krisis keuangan nasional. Dikutip dari BBC News Indonesia Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan dari OJK, Dian E Rae, mengungkapkan sampai saat ini belum melihat aksi nyata tarik uang massal di bank-bank BUMN. Dian, yang juga Anggota Dewan Komisiner OJK, mengatakan akan terus memantau bank-bank BUMN terkait adanya penarikan tidak biasa (unusual) yang disebabkan seruan tarik uang di jagat dunia maya.

Isu yang menjadi

polemik di masyarakat digital ini bergerak cukup liar, meskipun dampak negatifnya belum terlihat nyata. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai macam faktor, salah satunya komunikasi pemerintah kepada warganya. Kekosongan komunikasi yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat mencakup penjelasan secara rinci mekanisme pengelolaan dana yang akan digawangi Danantara. Warganet cenderung mencari-cari informasi dari sumber lain (bukan pemerintah), karena belum ada penjelasan resmi pemerintah terkait pengelolaan dana ini.

Fenomena seruan tarik uang ibaratnya seperti "tip



of an iceberg" atau puncak gunung es. Apabila pemerintah abai terhadap hal ini bisa jadi fenomena seruan tarik uang itu akan berkembang menjadi aksi nyata. Hal sama yang pernah terjadi di tahun 1997 yang berujung pada krisis ekonomi. Seperti yang diungkapkan Esther Sri Astuti, Ekonom INDEF, dikutip dari Kompas.com. "Satu orang mendorong akan menstimulasi orang lain. Kalau itu (tarik uang) masif, ya akhirnya bank bisa kolaps," jelas Esther.